



# Penilaian WDP Tak Maksimal

**Aset Tak Jelas pun Diperhatikan**

**SUNGAIRAYA** - Permasalahan aset di Kabupaten Kubu Raya yang masih belum jelas, mendapat perhatian serius dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Setelah memekarkan diri dari Kabupaten Pontianak, persoalan aset selalu menjadi masalah.

Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan, mengungkapkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kubu Raya sudah bekerja maksimal, untuk menyelesaikan permasalahan aset tersebut.

Predikat yang diberikan oleh BPK RI kepada Pemkab

yakni wajar dengan pengendalian (WDP), dirasakan Bupati tidak maksimal. Pasalnya, dia menambahkan bahwa permasalahan yang ada dalam penilaian tersebut, bukan merupakan penyimpangan anggaran. Namun, menurutnya, merupakan permasalahan aset yang merupakan warisan dari Kabupaten Pontianak.

Menurut dia, aset yang dilimpahkan oleh Pemerintah Kabupaten Pontianak tersebut keberadaannya tidak jelas, di mana volume, nilai, dan galitasnya tidak jelas, sehingga aset tersebut selalu menjadi permasalahan.

"Kalau sudah tidak jelas, maka jalan keluarnya aset

yang tidak jelas itu semuanya harus dihapuskan," katanya, usai Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kubu Raya, kemarin (8/7).

Dia berharap agar permasalahan tersebut bisa selesai dengan cepat dan diselesaikan bersama. Karena, ditambahkannya, jika tidak segera dihapuskan, maka Kabupaten Kubu Raya selamanya tidak akan pernah mendapatkan predikat wajar tanpa pengendalian (WTP) dari BPK RI. Dia menjelaskan, Pemkab sudah mengajak untuk dihapuskan bersama, di mana selanjutnya aset-aset tersebut akan diserahkan kembali ke Kabupaten Pontianak untuk bersama.

"Karena barangnya tidak ada, jika semuanya tidak ada hanya tercatat, namun barangnya tidak ada maka akan sulit. Kami berharap seperti ini bisa dipilah dengan jelas. Masalah opini bukan ukuran utama, karena opini hanya alah sebuah opini, hanya sebagai citra, yang penting penyimpangan jangan sampai banyak terjadi. Dan Kubu Raya tidak ada, hanya masalah aset yang tidak jelas ini," ucapnya.

Sementara itu, ketua DPRD Kabupaten Kubu Raya, Sujiwo, mengungkapkan hasil opini BPK RI, WDP yang diberikan kepada Pemkab sudah cukup baik, meskipun target utama yang diinginkan adalah WTP. "WTP yang diraih masih da-

lam batas yang diharapkan bersama, belum bisa meraih itu masalah utamanya adalah aset. Makanya kita sarankan kepada Pemkab untuk bisa bekerja keras bersama instansi terkait, bagaimana masalah aset agar segera diselesaikan," ungkapnya.

Dia berharap kepada Pemkab, terutama instansi terkait, agar membangun komunikasi dengan instansi terkait di Kabupaten Pontianak, agar ke depannya permasalahan aset dapat segera diselesaikan. Jika permasalahan aset sudah selesai, maka, dia yakin, pengelolaan keuangan nantinya tidak menutup kemungkinan bisa mendapatkan penilaian WTP. *(adg)*